

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. latar Belakang**

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia kini begitu cepat khususnya pada sektor perbankan. Terutama perbankan syariah yang merupakan institusi masyarakat dan diharapkan mampu memperlancar roda perekonomian pada suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam menuntut adanya lembaga keuangan syariah yang sesuai kebutuhan tidak sebatas finansial, namun juga tuntutan moralitas. Dengan adanya sistem bank yang terbebas dari praktik bunga diharapkan mampu menjauhkan pengusaha golongan menengah kebawah dan para pedagang kecil dari jeratan rentenir. Pedagang kecil merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapat bantuan dalam hal penyediaan modal untuk mengembangkan usaha. Ridwan (2004:133-134).

Lembaga keuangan syariah saat ini dikenal dengan sebutan KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) atau BMT (Baitul Maal wa Tamwil). sebagai salah satu lembaga keuangan islam dalam oprasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional. KSPPS BMT memiliki produk-produk syariah misalnya kredit atau pembiayaan, kredit yang diberikan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usaha pedagang kecil. Pembiayaan diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Pada KSPPS BMT BLATER pembiayaan syariah yang biasa digunakan adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama

(shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Bila terjadi kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola, sedangkan pengelola sudah menanggung kerugian waktu dan tenaga.

Pembiayaan bermasalah atau yang sering dikenal dengan *Non Performing Loan (NPL)* adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial (*potential loss*). Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Pembiayaan yang termasuk dalam kategori pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar (*sub standard*), pembiayaan yang diragukan (*doubt full*), dan pembiayaan macet (*loss*).

Sebagaimana yang terjadi pada KSPPS BMT BLATER yang berlokasi di daerah blater bandungan kabupaten semarang, berdirinya KSPPS BMT BLATER tidak lepas dari fungsinya guna menolong para pengusaha kelas menengah kebawah dan untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDA) di daerah BLATER dengan menyediakan modal usaha. Sistem pembiayaan yang ditekankan itupun dengan syarat dan kesepakatan yang mudah dan sesuai dengan aturan islam sehingga terhindar dari hal riba, dalam menjalankan oprasionalnya KSPPS BMT BLATER menggunakan sistem terprogram komputer berbasis software akuntansi syariah guna menghindari kesalahan dalam menginput data. Selain itu sistem manual juga diterapkan dalam setiap pelaksanaan kerjanya

seperti pembukuan pada setiap transaksi yang berlangsung untuk meminimalisir terjadinya kesalahan.

Meskipun beberapa upaya meminimalisir kesalahan telah dilakukan, pembiayaan mudharabah maupun jenis-jenis pembiayaan lain yang telah disalurkan dalam transaksi di KSPPS BMT BLATER kepada masyarakat tetap akan berpotensi timbulnya risiko. Beberapa risiko yang timbul dalam pembiayaan sebagian akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama diawal akad. Besar kecilnya resiko pembiayaan dapat menunjukkan kinerja suatu KSPPS BMT dalam pengelolaan dana yang dipercayakan masyarakat kepada KSPPS BMT tersebut. Setiap KSPPS BMT memiliki suatu usaha pokok pada pembiayaannya, misal menawarkan jasa kredit, dalam pemberian jasa kredit pihak KSPPS BMT perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan kredit pinjaman yang telah diterimanya.

Dengan adanya unsur-unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan perlunya suatu sistem informasi pembiayaan mudharabah untuk pengamanan kredit yang ada pada KSPPS BMT. Tujuan pengamanan adalah menghindari resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap pembiayaan kredit pinjaman serta memberikan sistem informasi pembiayaan yang jelas dalam aturan dan prosedurnya sangat penting.

Menurut Murdick, R.G (1991 : 27) Suatu sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau procedure-prosedure atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan atau barang pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan atau energi dan atau barang. sedangkan menurut (George H. Bodnar, 2000:1) Informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat.

Kesimpulannya Sistem informasi pembiayaan dalam hal pembiayaan berperan sangat penting karena didalamnya mencakup kumpulan informasi serta data mengenai barang dan pihak yang bersangkutan dalam pembiayaan pada suatu KSPPS BMT, bukti-bukti pada sistem informasi pembiayaan biasanya berupa formulir catatan pembiayaan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, yang digunakan tenaga pelaksanaanya dalam melakukan suatu laporan, dan didesain untuk mengolah data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan untuk memajemen sistem pada KSPPS BMT yang berjalan.

Selain perannya yang begitu penting pada pembiayaan mudharabah, sistem informasi akuntansi juga berperan penting sebagai pengaman harta kekayaan perusahaan. Dengan adanya unsur-unsur pengendalian atau pencegahan dalam sistem informasi, berbagai kecurangan, penyimpangan, dan kesalahan dapat dihindarkan atau dilacak sehingga dapat diperbaiki, sasaran sistem informasi akuntansi juga beragam, meskipun intinya tetap sama, yaitu menyajikan informasi. Dari latar belakang tersebut menjadi sumber bagi penulis untuk mengajukan Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS SISTEM INFORMASI

## PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH PADA KSPPS BMT BLATER”

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT BLATER?
2. Bagaimana analisis pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS BMT BLATER?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem informasi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BMT BLATER
2. Untuk mengetahui hasil analisis pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS BMT BLATER.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi penulis

Di harapkan mampu menambah ilmu dan wawasan bagi penulis tentang analisis sistem informasi pembiayaan mudharabah bermasalah pada KSPPS BMT BLATER serta dapat meningkatkan kemampuan keterampilan penulis dan menjadikan penulis lebih aktif, kreatif, inovatif dalam mengolah kalimat.

b. Bagi Fakultas Ekonomi

Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan maupun referensi, serta diharapkan dapat diolah kembali menjadi penelitian yang lebih sempurna, sehingga mampu menambah ilmu bagi pembacanya khususnya mengenai sistem informasi pembiayaan mudharabah bermasalah .

c. Bagi KSPPS BMT BLATER

Diharapkan mampu menjadi masukan dan acuan bagi KSPPS BMT BLATER khususnya dalam sistem informasi pembiayaan mudharabah bermasalah, serta diharapkan terjalinnya tali silaturahmi yang baik antara penulis dengan pihak KSPPS BMT BLATER.